

**PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP MASYARAKAT PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN**

Afif Muamar, M. Mabruhi Faozi dan Anny Fitriati

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

email: afifmuamar85@gmail.com, mabrurifaozi@gmail.com dan annyfitriati96@gmail.com

Abstract

The tourism industry is an activity in order to meet the needs of goods and services for tourists. The shopping area of Batik Trusmi is one of the tourism industry. Opportunities that exist in the tourism sector, especially in this area will have an impact on the economic and social culture of the surrounding community. Optimal management of tourist areas will have an impact on the increase in tourist visits, so it will be beneficial for the tourism industry and the surrounding community. This research uses qualitative research. The result of this research, it can be concluded that 1) the management of Batik Trusmi shopping area that is planning, organizing, actuating and controlling or supervision. 2) The existence of shopping area of Batik Trusmi impact for an economy of society Trusmi Kulon village that is the increase of income, open jobs and decreasing unemployment, the increase of land price, and there is dependence on tourist visiting. In addition, there are also socio-cultural impacts such as the preservation of Batik art, conversion of jobs, contamination of the environment, the use of infrastructure, and traffic jams.

Keywords: Management, Tourism Area of Batik, Impact on Economic and Social Culture.

Abstrak

Industri pariwisata merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi para wisatawan. Peluang yang ada pada sektor pariwisata khususnya di kawasan wisata belanja Batik Trusmi akan berdampak pada ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar. Pengelolaan yang optimal pada kawasan wisata akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan sehingga akan menguntungkan bagi pegiat industri pariwisata dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 2) Keberadaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi berdampak bagi perekonomian masyarakat desa Trusmi Kulon yaitu peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, adanya kenaikan harga tanah, dan ada ketergantungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Selain itu ada pula dampak terhadap sosial budaya masyarakat seperti pelestarian seni membatik, konversi mata pencaharian, adanya limbah batik, penggunaan infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Kawasan Wisata Batik, Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya.*

PENDAHULUAN

Cirebon merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Barat. Cirebon sering dikenal dengan Kota Wali/Kota Udang. Jumlah penduduk kota Cirebon saat ini mencapai 388.854 jiwa. Hal ini berdasarkan database kependudukan dan pencatatan sipil. Melihat banyaknya penduduk saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa minat masyarakat kota Cirebon untuk menunaikan ibadah haji pun meningkat.

Dalam era globalisasi, dewasa ini sektor pariwisata menjadi industri yang berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Potensi yang ada pada pariwisata di Indonesia tentu saja tidak di sia-siakan oleh Pemerintah. Presiden Joko Widodo menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi pada sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara yang menjanjikan. Oleh karenanya dari waktu ke waktu terus diperhatikan perkembangannya.¹

Industri pariwisata sering dianggap sebagai jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi Indonesia. Kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh impor yang naik, ekspor non-migas yang menurun, dan pembangunan ekonomi yang timpang, dipandang akan menjadi solusi dari permasalahan tersebut dengan adanya industri pariwisata. Industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pembangunan ekonomi regional, serta menyumbang neraca pembayaran.² Industri pariwisata tentunya

bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya dan terhadap negara. Dalam hal ini untuk mendorong pemerataan kesempatan berwirausaha dan memperoleh manfaat dari adanya sektor pariwisata seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".³

Dalam tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan semua sarana kehidupan yang ada di bumi sehingga apa yang kita butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya. Pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya.⁴

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan berada di jalur pantai utara (pantura) menjadikannya sebagai daerah yang sering dilalui. Secara geografis Cirebon letaknya strategis dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang mana dalam perekonomiannya ditunjang oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor pariwisata, sektor komunikasi, dan sektor jasa. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah. Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga merupakan dinas

¹www.beritasatu.com/nasional/345629-kembangkan-pariwisata-borobudur-jokowi-bertolak-ke-magelang.html. Diakses pada 25 Januari 2018.

²Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002), 37. Baca juga Aan Jaelani, Edy Setyawan dan Nursyamsudin Hasyim, "Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious,

Cultures and Culinary", *Journal of Social and Administrative Sciences*, Vol. 3, No. 1 (2016): 63-76.

³QS. Al-Baqarah (2): 29.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 166.

terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengelola, mengembangkan serta bertanggungjawab terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Cirebon.

Objek wisata belanja batik trusmi merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan. Letaknya yang strategis dan mudah diakses terlebih lagi adanya tol Cipali, menjadikannya destinasi wisata yang tidak bisa dilupakan ketika berkunjung ke kabupaten Cirebon. Kawasan wisata belanja ini melibatkan beberapa desa yaitu desa Weru Lor, desa Trusmi Kulon, desa Trusmi Wetan, dan desa Panembahan.

Keberadaan kawasan wisata belanja batik trusmi berdampak pada ekonomi masyarakat di desa Trusmi Kulon yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan usaha, sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengangguran. Namun kawasan wisata belanja batik trusmi juga berdampak pada kenaikan harga tanah, terutama yang letaknya strategis untuk membuka *showroom* batik. Kedatangan para wisatawan ke kawasan wisata belanja batik juga mengakibatkan pendapatan sebagian masyarakat bergantung pada wisatawan yang berkunjung. Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, terdapat pula dampak terhadap sosial dan budaya. Beberapa diantaranya yaitu adanya pelestarian seni dan budaya membatik sehingga dapat melestarikan warisan budaya tak benda yang asli dari Indonesia. Selain itu adanya konversi mata pencaharian, dari buruh pabrik, supir menjadi pedagang, karyawan *showroom*, penjahit, dan pembuat souvenir. Kedatangan wisatawan yang biasa ramai diakhir pekan atau hari libur nasional mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan polusi di desa Trusmi Kulon.

Dalam hal ini pengelolaan yang optimal kawasan wisata belanja batik trusmi bertujuan untuk menarik minat wisatawan. Namun dalam perkembangannya kawasan ini tidak begitu banyak perubahan dalam upaya menarik minat wisatawan. Kawasan wisata belanja batik trusmi belum mempunyai fasilitas yang memadai

berkaitan dengan lahan parkir umum untuk wisatawan, atraksi hiburan, serta sarana penunjang lainnya. Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi di Desa Trusmi Kulon? 2) Apa dampak dari kawasan wisata belanja batik trusmi terhadap ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa Trusmi Kulon?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang pengelolaan kawasan wisata bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nungki Pahrusadi (2017),⁵ Penelitian skripsi ini memakai pendekatan metode penelitian kualitatif yang berupa menarik menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data lapangan yang ditemui untuk dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian ini berkesimpulan terdapat dua manajemen yang pertama manajemen makam Keramat Dermaloka dan manajemen objek wisata umum sekitar objek wisata, akan tetapi dua manajemen tersebut dikelola oleh satu kepengurusan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam manajemen objek wisata Balong Keramat Dermaloka ditinjau hukum ekonomi Islam bahwa pelaksanaan yang terjadi di kawasan wisata tersebut tidak ada bentuk ritual pesugihan atau ritual yang menyimpang dari syariat Islam.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nur Aqilah (2016),⁶ Penelitian skripsi

⁵Nungki Pahrusadi, "Manajemen Wisata Religi di Objek Wisata Balong Keramat Dermaloka Kuningan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam", *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

⁶Nur Aqilah, "Pengelolaan Wisata Cipadung Sebagai Penguatan Ekonomi Lokal (Studi Kasus di

tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Objek Wisata Cipadung memberikan pendapatan bagi daerah sekaligus pemasukan bagi devisa negara. Selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berasal dari banyaknya wisatawan yang datang, sehingga dapat membantu perekonomian warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang pengelolaan kawasan wisata terutama di wisata belanja batik trusmi yang ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode (jalan) penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat.⁸ Pada penelitian ini peneliti mengamati pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi dan dampaknya terhadap ekonomi

dan sosial budaya masyarakat desa trusmi kulon berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada bulan Februari-Mei 2018.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara dengan bapak Edwin selaku seksi destinasi pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Cirebon, aparatur desa trusmi kulon, pemilik *showroom* batik, dan masyarakat desa trusmi kulon. Adapun data sekunder ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Cirebon, literatur dan kajian pustaka yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. *Pertama* Menurut Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku atau sesuatu yang tampak. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif.⁹ Peneliti melakukan observasi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dan kawasan wisata belanja batik trusmi desa Trusmi Kulon kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Kedua, Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan berguna untuk mendapatkan

Desa Pajajar Kabupaten Majalengka)", *Skripsi* (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).

⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.

⁸Wardiyanta, *Metodologi Penelitian Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 5.

⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 209.

suatu informasi berkenaan dengan pengelolaan kawasan wisata batik trusmi di desa Trusmi Kulon kecamatan Plered kabupaten Cirebon dengan pedoman Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Edwin selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Bapak Hadirman selaku Sekretaris Desa Trusmi Kulon, Pemilik *showroom* batik di desa Trusmi Kulon, dan masyarakat desa Trusmi Kulon.

Ketiga, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara menyalin atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Seperti misalnya buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan.

Keempat, Studi kepustakaan adalah kegiatan yang mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang suatu penelitiannya.¹¹ Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu mengetahui jenis pustaka, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka serta menyajikan studi kepustakaan.

Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelempokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data Model Miles dan Huberman, menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Berikut langkah-langkah analisis datanya¹² yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing*.

KONSEP DASAR

Pengelolaan Kawasan Wisata

Kata “pengelolaan” berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.¹³

Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.¹⁴ Pengelolaan pariwisata tidak terbatas pada kawasan, obyek, dan daya tarik wisatanya saja, tetapi juga para wisatawan dan berbagai unsur penunjangnya. Sebab kelancaran pariwisata tergantung pada ketepatan manajemen berbagai unsur penunjang. Karena itu untuk ketepatan manajemen, pemanfaatan berbagai sumber daya sebagai unsur penunjang pariwisata perlu dilakukan dengan cermat dan rinci.

¹⁰Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

¹¹Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 45.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 22.

¹⁴I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2009), 81.

Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata sudah seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta mengutip pendapat Cox, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:¹⁵

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Konservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengacu pada khasanah budaya lokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pariwisata dalam Islam

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan kata *al-siyahah*, *al-rihlah*, dan *al-safar*.¹⁶ Kata *al-safar* dalam Al-Quran mempunyai beragam makna yaitu¹⁷: (a)

membuka dan membersihkan debu, (b) menunjukkan warna seperti dalam surah Al-Mudatstsir ayat 34, (c) melakukan perjalanan seperti dalam surah An-Nisa ayat 43, (d) bermakna kitab seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5.

Manusia di dunia ini dianjurkan untuk melakukan tadabbur alam, dalam rangka menikmati dan mensyukuri segala ciptaan Allah di bumi ini. Perjalanan yang dilakukan manusia hendaknya bertujuan mengingatkan manusia dengan segala Kekuasaan Allah. Sehingga perjalanan yang dilakukan bukan hanya bersifat duniawi, akan tetapi menambah rasa mensyukuri segala nikmat yang Allah beri di muka bumi ini.

Dalam pandangan Islam, pariwisata juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban penciptaan Allah dan menikmati keindahan alam semesta, sehingga akan membuat jiwa manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup.¹⁸ Berikut adalah penjabarannya:

Pertama, perjalanan dianggap sebagai ibadah karena diperintahkan untuk melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan Dzulhijah dan umrah yang bisa dilakukan kapanpun.

Kedua, dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. Seperti dalam Surat At-Taubah ayat 112.

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁵ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 81.

¹⁶Johan Arifin, "Wawasan al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata", *An-Nur*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2014): 147.

¹⁷Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah: Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya

dalam al-Quran", *Human Falah*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2014): 137.

¹⁸Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Indonesia: Potencial and Prospect", *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017): 28.

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu".¹⁹

Ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa ayat Al-Quran berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi." Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman".²⁰

Ayat di atas menganjurkan untuk berjalanlah yang artinya bepergian. Bila pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi, dan bersenang-senang, Al-Quran sebagai sumber ajaran yang universal dalam ayatnya member isyarat akan kebolehan bagi kita untuk memetik kesenangan di dunia ini. Menikmati hal-hal yang menyenangkan, mempesona dan member kedamaian serta ketenangan hati tidaklah dilarang karena semua itu merupakan naluri

manusia.²¹ Dalam surat al-Naml ayat 69-70, dijelaskan bahwa:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.

Artinya: "Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan".²²

Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Hal tersebut adalah misi Rasul dan para sahabat beliau. Para sahabat Nabi menyebar ke seluruh dunia untuk mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran.

Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi Masyarakat

Ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Bidang industri, perdagangan, jasa, transportasi, hingga pariwisata tidak terlepas dari ekonomi. Saat ini pariwisata menjadi industri yang menjanjikan untuk dikembangkan dan diambil manfaatnya. Dampak terhadap ekonomi menjadi harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pariwisata juga dapat meningkatkan devisa negara. Akan tetapi selain berdampak positif, pariwisata juga berdampak negatif. Seperti adanya kenaikan harga tanah, dan pengkavelingan tempat hanya bagi orang yang mempunyai uang. Namun apabila pengembangan pariwisata ditangani secara benar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.

²¹Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran al-Qur'an dan Hadits* (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), 72.

²²QS. Al-Naml (6): 69-70.

¹⁹Q.S At-Taubah (9):112.

²⁰QS. Al-An'am (6): 11-12.

Sektor pariwisata diyakini tidak sekedar hanya mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara untuk pembangunan yang sedang dikejar oleh pemerintah, akan tetapi dapat mengentaskan kemiskinan. Pemilihan sektor pariwisata sebagai salah satu alternatif mengentaskan kemiskinan cukup beralasan. Keterlibatan langsung masyarakat yang berpendapatan rendah dalam pengembangan industri pariwisata melalui pemanfaatan hasil kerajinan tangan (*handicraft*) pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, produk hasil seni dan budaya tradisional serta pengembangan desa wisata sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan. Pariwisata diyakini sebagai (*agent of development*) dan sekaligus menjadi penggerak dan mempercepat proses pembangunan itu sendiri.²³ Pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun daerah yang menjadi tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Terlebih lagi dengan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan tingkatan budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Suatu daerah tujuan wisata yang dikembangkan seperti itu akan merupakan daerah yang mampu member pengalaman yang unik bagi mereka.²⁴

Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Budaya Masyarakat

Secara teoretikal-idealistis, antara dampak sosial dan budaya dapat dibedakan. Namun demikian, Matheison and Wall menyebutkan bahwa “*there is no clear distinction between social and cultural*

phenomena,” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa ialah bahwa tidak ada kejelasan perbedaan antara gejala sosial dan budaya, sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata ke dalam judul “dampak sosial budaya” (*the sociocultural impact of tourism in context*). Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, terdapat faktor lain yang berperan dalam perubahan kondisi sosial budaya tersebut, seperti pendidikan, media masa, transportasi, komunikasi, serta dinamika masyarakat itu sendiri.²⁵

Menurut I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri mengutip pendapat Cohen dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar, yaitu:

- a. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
- b. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
- c. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;
- d. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
- e. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
- f. Dampak terhadap pola pembagian kerja;
- g. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
- h. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
- i. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial; dan
- j. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Kegiatan kepariwisataan melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan kepariwisataan diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum adalah

²³Oka, A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 14-18.

²⁴Robert Christie Mill, *Tourism the International Business*, Terj. Tri Budi Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 168.

²⁵I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, 114-115.

himpunan peraturan-peraturan berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yaitu Undang-Undang.²⁶

Adapun ruang lingkup berkenaan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yaitu sebagai berikut:

Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 7

Pembangunan pariwisata meliputi:

a. Industri pariwisata

Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur fungsi, hierarki, dan hubungan industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

b. Destinasi pariwisata

Pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

c. Pemasaran

Pembangunan pemasaran antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

d. Kelembagaan pariwisata.

Pembangunan kelembagaan pariwisata antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk

²⁶Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), 39.

pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan datang tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan. Dunia pariwisata tidak sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan.²⁷

Hak dan Kewajiban Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Daerah

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.²⁸ Pengertian pengusaha pariwisata menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

²⁷<https://www.boyendratamin.com/2011/05/pengelolaan-dan-pengurusan.html>. Diakses pada tanggal 7 April 2018. Lihat juga Aan Jaelani, "Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective", *Journal of Economics Bibliography*, Vol. 3, No. 2 (2016): 226.

²⁸Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 82.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁹

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan

kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa yang disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang disebut pemerintah daerah gubernur, walikota atau bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berikut adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah:

Pasal 23 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

²⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Masyarakat Sekitar Destinasi
Pariwisata
Pasal 19

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Kawasan Wisata Belanja Batik Trusmi: Sejarah Batik Trusmi

Kata batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti meulis dan “titik”. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna. Dalam

bahasa Inggrisnya disebut *wax resist dyeing*.³⁰

Batik Trusmi mulai ada sejak abad ke 14 suatu daerah dimana saat itu tumbuh banyak tumbuhan, kemudian para warga menebang tumbuhan tersebut namun secara seketika itu tumbuhan itu tumbuh kembali. Sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi. Kisah membatik Desa Trusmi berawal dari peranan Ki Gede Trusmi. Salah seorang pengikut Sunan Gunung Jati yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama Islam.

Asal mulanya Sultan Kraton menyuruh orang trusmi untuk membuat batik seperti miliknya tanpa membawa contoh baik, dia hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Saat jatuh tempo, orang trusmi itu kemudian datang kembali dengan membawa batik yang telah dia buat. Ketika itu orang trusmi tersebut meminta batik yang asli kepada Sultan yang kemudian di bungkuslah kedua batik itu antara batik yang asli dengan batik buatannya. Orang trusmi kemudian meminta kepada sultan untuk memilih batik yang asli namun sangking miripnya sultan tidak dapat membedakannya, batik duplikat tersebut tidak ada yang meleset sama sekali dari batik aslinya, sehingga sultan mengakui bahwa batik buatan orang trusmi sangak bagus tanpa harus membawa contoh batik yang aslinya.³¹

Disepanjang jalan utama berjarak 1,5 km dari desa Trusmi sampai Panembahan saat ini banyak dijumpai puluhan *showroom* batik. Berbagai papan nama *showroom* nampak berjejer menghiasi setiap bangunan yang ada di tepi jalan. Munculnya berbagai *showroom* tidak terlepas dari tingginya minat masyarakat terutama dari luar kota terhadap batik Cirebon. Batik trusmi berhasil menjadi ikon batik dalam koleksi

³⁰<https://batikpekalongan.wordpress.com/2007/09/26/asal-batik/>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2018.

³¹<http://batik-etnik.blogspot.co.id/p/sejarah-batik-trusmi-cirebon.html>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2018.

kain nasional. Batik Cirebon sendiri termasuk dalam kelompok batik keraton. Hal ini dikarenakan Cirebon memiliki dua buah keratin yaitu keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, yang konon berdasarkan sejarah dari dua keraton ini muncul beberapa desain batik Cirebonan klasik yang hingga sekarang masih dikerjakan oleh sebagian masyarakat desa Trusmi diantaranya seperti Mega Mendung, Paksinaga Liman, Patran Keris, Patran Kangkung, Singa Payung, Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas, Sawat Penganten, Katewono, Gunung Giwur, Simbar Menjangan, Simbar Kendo dan lain-lain.³²

Atraksi dan Fasilitas³³

Kawasan wisata belanja batik trusmi menampilkan atraksi kerajinan batik, pengrajin batik, kampung batik, produk kerajinan batik, galeri batik dan kuliner. Sedangkan fasilitas yang ada pada kawasan wisata belanja batik trusmi seperti butik, pusat grosir, parkir, musholla, pujasera, dan toilet.

Aksesibilitas³⁴

Kawasan wisata belanja batik trusmi salah satunya terletak di Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang berjarak 9 KM dari pusat kota Sumber maupun dari Kota Cirebon. Untuk mencapai lokasi kawasan wisata belanja batik trusmi ini bisa menggunakan mobil, motor atau beca yang terdapat di sepanjang jalan masuk ke kawasan ini. Apabila menggunakan angkutan umum bisa menggunakan angkutan kota (angkot) GP yang berasal dari wilayah kota, selain itu bisa menggunakan angkutan Sumber-Plered, elf Cirebon-Palimanan dan Cirebon Bandung. Karena angkutan umum hanya berhenti di jalan raya, untuk bisa mengelilingi kawasan

wisata belanja batik trusmi bisa menggunakan beca.

Pengelolaan Kawasan Wisata Belanja Batik Trusmi

Keberadaan kawasan wisata belanja batik trusmi tidak terlepas dari pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Berikut adalah pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi berdasarkan penelitian penulis:

Pertama, kewenangan pemerintah Desa Trusmi Kulon, Desa Trusmi Kulon merupakan salah satu desa yang berada di kawasan wisata belanja batik trusmi. Jumlah *showroom* batik yang ada di desa Trusmi Kulon ini mencapai 40 *showroom*, mendominasi dibandingkan dengan desa yang lain. Keberadaan *showroom* di desa Trusmi Kulon tentunya menjadi perhatian sendiri oleh pemerintah desa.

Berikut adalah kewenangan pemerintah desa trusmi kulon dalam pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi: (a) perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan dengan merumuskan program yang didalamnya terdapat segala sesuatu yang akan dilaksanakan. Pemerintah desa trusmi kulon berencana memberikan akses kendaraan wisatawan masuk ke *showroom* yang berada di dalam dengan menyediakan lahan parkir. Kedatangan wisatawan diakhir pekan dan hari libur sering menjadi penyebab dari kemacetan di jalan desa. Namun hal tersebut disisi lain disyukuri masyarakat karena bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat di kawasan ini. Selanjutnya yaitu berkordinasi untuk izin pembukaan *showroom*. Untuk membuka *showroom* di kawasan wisata belanja batik trusmi pengusaha wajib melengkapi dokumen NPWP, IMB, SIUP, SITU, AMDAL. Kelengkapan dokumen tersebut akan dilengkapi dengan formulir izin tetangga yang bisa di dapatkan di kantor desa setempat juga surat keterangan sewa/kepemilikan lokasi usaha. Dokumen tersebut semua ditandatangani oleh pihak desa dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan untuk ditandatangani.

³²Penyusunan Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.

³³Penyusunan Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.

³⁴Penyusunan Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.

Terakhir yaitu menjaga keamanan dengan adanya petugas linmas (perlindungan masyarakat). Keamanan dan kenyamanan suatu kawasan wisata bergantung terhadap kesiapan sumber daya yang ada. Dalam hal ini adanya petugas linmas desa berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan. Selain itu pihak desa berkordinasi dengan para *security* atau satpam yang berada di setiap *showroom* untuk berjaga apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pencurian. (b) pengorganisasian (*organizing*) struktur organisasi pemerintah desa Trusmi Kulon yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yaitu seksi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi kurang didukung oleh kelompok penggerak pariwisata. Kelompok ini pada tahun 1990an sampai 2000an masih aktif, tapi sekarang kepengurusannya tidak ada yang melanjutkan. Padahal kelompok penggerak pariwisata bisa dijadikan wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi dalam memajukan kawasan wisata belanja batik trusmi. Peran serta tanggungjawab seluruh pihak untuk bisa mengaktifkan kembali adanya kelompok penggerak pariwisata di kawasan wisata belanja batik trusmi. (c) penggerakan (*actuating*) ada beberapa pengelolaan yang dilakukan desa trusmi kulon berkenaan dengan kawasan wisata belanja batik trusmi: (1) mengikuti sosialisasi masyarakat sadar wisata yang diselenggarakan oleh Disbudparpora, (2) memberikan dukungan akan keberadaan industri pariwisata dengan mengusahakan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat lokal, (3) memantau keamanan sekitar *showroom* terutama ketika terjadi kepadatan dan keramaian lalu lintas. (d) pengawasan (*controlling*) dapun pengawasan atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa trusmi: (1) Pengawasan terhadap lingkungan terutama adanya limbah batik yang biasa dibuang ke selokan, (2)

pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan adanya dampak negatif seperti keributan antar warga yang bisa mengganggu wisatawan yang berkunjung.

Kedua, kewenangan disbudparpora dalam mengelola kawasan wisata belanja batik trusmi: (a) perencanaan (*planning*) kawasan wisata belanja batik trusmi saat ini mempunyai program untuk pengembangan kawasan destinasi wisata.³⁵ Pengelolaan untuk pengembangan objek wisata dilakukan haruslah dengan niat baik, yaitu dengan memfokuskan agar pengembangan pariwisata memiliki dampak positif yang bisa dimaksimalkan dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. (b) pengorganisasian (*organizing*) struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yaitu bidang pariwisata yang menaungi seksi jasa dan promosi pariwisata serta seksi destinasi pariwisata. Selain itu bidang seksi jasa promosi pariwisata mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis operasional kegiatan promosi. Sedangkan bidang destinasi pariwisata mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pembinaan masyarakat, sarana prasarana pariwisata, dan usaha sarana pariwisata. (c) penggerakan (*actuating*) melakukan promosi melalui web, sosial media, brosur, dan mengikuti pameran, pembinaan masyarakat sadar wisata, dan pengarahannya sapa pesona.³⁶ (d) pengawasan (*controlling*) dengan cara monitoring terhadap perkembangan usaha pariwisata dan sarana pariwisata yang ada di kawasan wisata belanja batik trusmi. Selain itu berkordinasi dengan pihak pemerintah desa, pemilik *showroom*, serta masyarakat untuk kelangsungan, keamanan dan kenyamanan kawasan ini.

³⁵Wawancara dengan Bapak Momon Saptaji selaku Kepala seksi Kesenian tanggal 20 Maret 2018.

³⁶Wawancara dengan Bapak Edwin selaku Kepala Destinasi Pariwisata tanggal 20 Maret 2018.

Ketiga, kewenangan *showroom* batik berikut adalah pengelolaan yang dilakukan oleh para pemilik *showroom* batik: (a) perencanaan (*planning*) Perencanaan merupakan kegiatan dengan usaha merumuskan suatu program. Pengelolaan yang dilakukan setiap *showroom* berawal dari perencanaan dalam pengadaan barang atau kain batiknya sendiri untuk bisa dijual di *showroom*. Untuk pengadaan barang yang akan dijual biasanya setiap *showroom* mempunyai pengrajin sendiri, adapula yang mengambil dari pengrajin dirumahnya. Barang yang dijual bukan hanya kain batik saja, akan tetapi ada baju, souvenir dan oleh-oleh khas Cirebon. Selain ada perencanaan dalam pengadaan barang, terdapat juga perencanaan dalam hal pengadaan tenaga kerja atau karyawan. Pengadaan tenaga kerja biasanya dengan membuka lowongan kerja pada setiap *showroom*. Selain membuka lowongan kerja adapula dengan sistem kekeluargaan, biasanya mereka mencari keluarga terdekat untuk menjadi karyawan. (b) pengorganisasian (*organizing*) Selain adanya perencanaan, adapula pengorganisasian dimana kegiatan ini didasari pada pelaksanaan manajemen untuk mengatur seluruh sumber daya manusia. Setiap *showroom* mempunyai sistem pengorganisasian yang berbeda. Ada yang telah dibuat secara struktural, adapula yang bersifat kekeluargaan. Secara umum adanya pengorganisasian dalam rangka pengelompokan dan pembagian kerja untuk mencapai target yang telah direncanakan. (c) penggerakan (*actuating*) penggerakan merupakan suatu kegiatan menggerakkan setiap sumber daya manusia untuk bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Penggerakan sumber daya manusia pada setiap *showroom* mempunyai sistem yang berbeda. Tapi pada umumnya sama seperti pemberian contoh dalam melaksanakan kerja, pembinaan, dan memotivasi untuk selalu lebih baik serta bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan. (d) pengawasan (*controlling*) pengawasan merupakan tahap terakhir suatu pengelolaan. Semua kegiatan yang telah

dilakukan dilaporkan kemudian dievaluasi. Pelaporan dan evaluasi pada setiap *showroom* umumnya berkenaan dengan produksi, pendapatan, pengeluaran, promosi, dan kinerja para karyawan. Tujuan dari adanya pengendalian dan pengawasan ini untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan dan dijadikan acuan untuk kedepannya lebih baik lagi.

Dampak Kawasan Wisata Belanja Batik Trusmi Terhadap Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Trusmi Kulon

Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.³⁷ Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.³⁸ Sedangkan menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang di terima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.³⁹ Berdasarkan kesimpulan wawancara dengan perangkat desa, bahwa mayoritas mata pencaharian di desa Trusmi Kulon ialah pengrajin batik selain itu ada karyawan *showroom*, pedagang, penjahit, pembuat souvenir yang tentunya bergantung pada kedatangan wisatawan.⁴⁰

Pengembangan industri pariwisata tentunya menciptakan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri pariwisata akan menyerap tenaga kerja yang berada di sekitarnya. Sehingga kedatangan wisatawan ke daerah tujuan wisata diharapkan akan mengeluarkan

³⁷Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 1: Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 170.

³⁸Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan. Diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

³⁹Sukirno Sandono, *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Hadirman selaku Sekretaris Desa tanggal 21 Maret 2018.

sejumlah uang untuk membeli suatu barang dan jasanya. Semakin banyak pengunjung dan membeli hasil dari pengrajin tentunya akan meningkatkan produksi yang berdampak pada peningkatan terhadap pendapatan. Hal tersebut juga akan meningkatkan pendapatan pihak-pihak yang terlibat.

Kedua, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Lapangan kerja yang ada di desa Trusmi Kulon ini tentunya banyak sekali. Namun yang berkaitan dengan kawasan wisata belanja batik trusmi ini sebagai karyawan, pengrajin, penjahit, pembuat souvenir, satpam, dan pedagang kuliner di sekitar *showroom*. Keberadaan lapangan kerja ini karena kebutuhan akan banyaknya wisatawan yang datang. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.⁴¹ Adanya lapangan kerja yang berkaitan dengan industri pariwisata di kawasan wisata belanja batik trusmi setidaknya bisa mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat desa Trusmi Kulon.

Ketiga, kenaikan harga tanah. Dampak dari adanya industri pariwisata ini yaitu kenaikan harga tanah. Kenaikan harga tanah tersebut dikarenakan banyaknya permintaan terhadap letak tanah yang strategis untuk membuka *showroom*. Semakin banyaknya wisatawan yang datang ke kawasan ini, akan semakin tumbuh perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi daerah akan menentukan harga tanah dan bangunan yang ada di sekitarnya. Kawasan wisata belanja batik trusmi menjadi daerah yang perkenomiannya bertumpu pada industri pariwisata belanja batik. Industri pariwisata telah berdampak terhadap harga tanah yang harganya bisa lebih dari 10 kali lipat dari harga tanah di perumahan warga.

Keempat, ketergantungan pada wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan simpulan di kawasan wisata belanja batik trusmi, bahwa ada pendapatan yang bergantung terhadap wisatawan yang

berkunjung. Karenanya apabila sedikit wisatawan yang berkunjung maka akan berdampak pada pendapatan mereka. Begitupula apabila semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka akan semakin banyak pendapatan untuk pelaku industri pariwisata disini.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: *pertama*, Pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi melibatkan semua pihak yang terlibat dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini Disbudparpora Kabupaten Cirebon, pemerintah desa Trusmi Kulon, dan pemilik *showroom* batik. Pengelolaan yang digunakan di kawasan wisata belanja batik trusmi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, karena menggunakan proses tersebut akan dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang dimaksudkan setiap pihak untuk pengembangan kawasan ini.

Kedua, Dampak dari kawasan wisata belanja batik trusmi terhadap masyarakat desa Trusmi Kulon bidang ekonomi yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, adanya kenaikan harga tanah, dan ketergantungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Sedangkan dalam bidang sosial budaya di masyarakat yaitu pelestarian seni dan budaya membatik, konversi mata pencaharian, pencemaran lingkungan, penggunaan infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas.

Ketiga, Pengelolaan kawasan wisata belanja batik trusmi yang melibatkan pihak Disbudparpora, pemerintah desa Trusmi Kulon dan pemilik *showroom* batik sebagian telah sesuai dengan landasan hukum kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan berdasarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh para pihak terkait.

⁴¹Wawancara dengan Bapak Hadirman selaku Sekretaris Desa tanggal 21 Maret 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulSyani. *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Aqilah, Nur. “Pengelolaan Wisata Cipadung Sebagai Penguatan Ekonomi Lokal (Studi Kasus di Desa Pajajar Kabupaten Majalengka)”, *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Arifin, Johan. “Wawasan al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata”, *An-Nur*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2014).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Boediono. *Pengantar Ilmu Ekonomi Nomor 1: Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan. Diakses pada tanggal 26 Maret 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Effendy, Mochtar. *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Hadits*. Palembang: Al-Mukhtar, 1996.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- <http://batik-etnik.blogspot.co.id/p/sejarah-bati-trusmi-cirebon.html>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2018.
- <https://batikpekalongan.wordpress.com/2007/09/26/asal-batik/>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2018.
- <https://www.boyyendratamin.com/2011/05/pengelolaan-dan-pengurusan.html>. Diakses pada tanggal 7 April 2018.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jaelani, Aan, Edy Setyawan dan Nursyamsudin Hasyim. “Religious Heritage Tourism and Creative Economy in Cirebon: The Diversity of Religious, Cultures and Culinary”, *Journal of Social and Administrative Sciences*, Vol. 3, No. 1 (2016).
- Jaelani, Aan. “Cirebon as the Silk Road: A New Approach of Heritage Tourism and Creative Economy”, *Journal of Economics and Political Economy*, Vol. 3, No. 2 (2016).
- _____. “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potencial and Prospect”, *International Review of Management and Marketing*, Vol. 7, No. 3 (2017).
- _____. “Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective”, *Journal of Economics Bibliography*, Vol. 3, No. 2 (2016).
- Mill, Robert Christie. *Tourism the International Business*, Terj. Tri Budi Sastrio. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Pahrusadi, Nungki. “Manajemen Wisata Religi di Objek Wisata Balong Keramat Darmaloka Kuningan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Penyusunan Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah Kabupaten Cirebon.
- Pitana, I Gede, dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sandono, Sukirno. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2002.
- Syahriza, Rahmi. “Pariwisata Berbasis Syariah: Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam Al-Quran”, *Human Falah*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2014).
- Theo, Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wardiyanta. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI, 2006.
- www.beritasatu.com/nasional/345629-kembangkan-pariwisata-borobudur-jokowi-bertolak-ke-magelang.html. Diakses pada 25 Januari 2018.
- Yoeti, Oka, A. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.